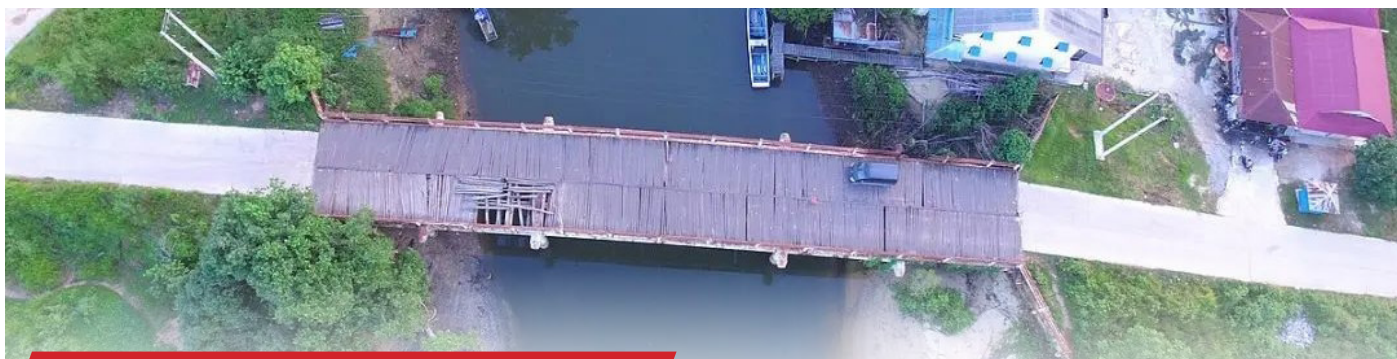




## JEMBATAN SAMBERA BAKAL DITUTUP AKIBAT PERBAIKAN, PENGGUNA JALAN DIALIHKAN LEWAT PERTAMINA



## SEMARAK FKR 2023, UPAYA LESTARIKAN BUDAYA LOKAL KUKAR



## REHABILITASI JEMBATAN SAMBERA

1 Jembatan Sambera akan ditutup 3 bulan, sejak 23 September-31 Desember 2023,

2 Pemkab Kukar siapkan 2 jalur alternatif, di KM 08 Pipeline dan KM 10

Pipeline, hasil koordinasi dengan Pertamina,

3 Kendaraan seberat 9 ton saja yang diperkenankan Pertamina untuk melalui jalan milik mereka,

4 Perbaikan memakan anggaran Rp 11 miliar,

5 Perbaikan diantaranya menggunakan bahan FRP untuk konstruksi bagian bawah jembatan, meningkatkan kinerja pondasi utama hingga 30 persen,

6 Rangka jembatan meng-

gunakan baja Wide Flange. Sementara lantai jembatannya menggunakan beton jenis K350,

7 Spesifikasi Jembatan Sambera nanti mampu menopang kendaraan alat berat hingga 8-10 ton

Sumber : Bidang Bina Marga Dinas PU Kukar.  
Diolah : mediakaltim.com

# JEMBATAN SAMBERA BAKAL DITUTUP AKIBAT PERBAIKAN, PENGGUNA JALAN DIALIHKAN LEWAT PERTAMINA

**TENGGARONG** - Rehabilitasi Jembatan Sambera yang berada di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, terus berprogres. Pengerjaan yang dilakukan sejak Juni 2023 lalu, kini sudah mulai dalam tahapan penutupan total jembatan.

Penutupan secara full sendiri akan dilakukan pada 23 September hingga 31 Desember 2023. Lantaran pihak kontraktor akan segera melakukan pengerjaan badan jalannya.

Maka dari itulah, masyarakat pun harus mengambil jalan alternatif. Yakni dengan melalui jalur alternatif di KM 08 Pipeline dan KM 10 Pipeline milik Pertamina. Yang lokasinya berada sejauh 2 kilometer (km) dari lokasi Jembatan Sambera. Karena jalan tersebut milik Pertamina, maka kendaraan besar yang akan melintas pun dibatasi. Maksimal kendaraan seberat 9 ton saja, selebihnya tidak bisa memanfaatkan akses tersebut. Z

"Sebelumnya kita juga kerjakan jalan pengalihan yang dimiliki Pertamina (KM 08 dan

KM 10 Pipeline Pertamina)," ujar Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar, Restu Irawan, Kamis (14/9/2023).

Jembatan yang juga sebagai jalan alternatif Bontang-Samarinda ini akan direhab senilai Rp 11 miliar. Jembatan yang memiliki lebar 8 meter dan sepanjang 60 meter ini, sudah diperkuat konstruksi bagian bawahnya sebelumnya. Menggunakan bahan Fiber Reinforced Polymer (FRP), serat karbon yang berfungsi untuk perkuatan struktur. Bahan ini digunakan untuk meningkatkan kekuatan tarik pada balok, dengan harapan mampu meningkatkan kinerja balok hingga 30 persen.

Untuk menambah usia struktur bawah jembatannya, dicat menggunakan bahan anti karat dan lumut. Karena air yang mengalir di bawahnya mengandung air asin. Rangka jembatan dilakukan dengan menggunakan baja Wide Flange. Lantai jembatannya pun akan diganti dan diberi perkuatan, yakni dari jenis bondeck diganti

dengan perkuatan beton jenis K350.

Ketika jembatan sudah dibangun dan siap, diharapkan mampu menjawab harapan masyarakat yang menginginkan Jembatan Sambera yang lebih baik lagi. Mengingat banyak warga Kecamatan Muara Badak yang mengeluhkan akses jembatan tersebut yang rusak parah.

Namun Restu menambahkan, masyarakat bisa bijak dan saling menjaga keberadaan jembatan tersebut. Yakni membatasi kendaraan alat berat 8-10 ton saja yang melewati. Karena jika melebihi beban yang seharusnya, akan berdampak langsung dengan kondisi jalan jembatan yang sudah dibangun dengan anggaran yang besar.

"Kita masih fokus menyelesaikan perbaikan. Nanti juga ada rencana jalan (Jembatan Sambera) di sana ditingkatkan menjadi jalan berstatus provinsi," tutup Restu. (adv)

**Penulis : Muhammad Rafi'i**  
**Editor : Nicha Ratnasari**





Istimewa

Penampilan salah satu peserta lomba Tari Jepen dalam rangkaian Festival Kota Raja (FKR) Tenggarong.

## Semarak FKR 2023, Upaya Lestarkan Budaya Lokal Kukar

**TENGGARONG** - Festival Kota Raja (FKR) 2023 sedikit lebih berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kali ini lebih menonjolkan kearifan lokal dan kelestarian budaya lokal Kutai. Tentunya, acara ini semakin meriah dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Beragam kegiatan disajikan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-241 Tenggarong sejak tanggal 10-16 September 2023 mendatang. Di antaranya, Lomba Jepen antar OPD dan kecamatan, Lomba

Baju Miskat, Gowes Wisata Idaman, Zumba Party, Lomba Senam Kreasi, Lomba Kuliner, Lomba Bertarsul dan Lomba Ngapeh (bercerita).

"Bedanya sekarang banyak kontennya, dengan menonjolkan kearifan lokal dan kelestarian budaya Kutai," ungkap Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar, Slamet Hadiraharjo, Kamis (14/9/2023).

Tidak seperti tahun sebelumnya yang lebih kepada komunitas untuk tampil. Seluruh OPD pun kini saling unjuk gigi, dalam menampilkan karya Tari Jepennya. Selain memajukan budaya lokal Kutai, juga mempererat tali

silaturahmi dan meningkatkan partisipasi antar OPD.

Slamet pun optimis, FKR 2023 yang memakan anggaran hingga Rp 300 juta ini, bisa berdampak luas bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kukar yang berjualan di Halaman Parkir Stadion Rondong Demang Tenggarong, sebagai venue acara sepekan kedepan.

"Harapannya tembus ratusan juta, dalam sepekan ini bisa mencapai Rp 500 juta," tutup Slamet.

**Penulis : Muhammad Rafi'i**

**Editor : Nicha Ratnasari**



Ady/Radar Kukar

Plt Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanesa Vilna.

## Jaring Aspirasi Masyarakat, Bappeda Kukar Luncurkan Ruang Runding

**TENGGARONG** - Untuk menjaring aspirasi masyarakat luas, dalam penyusunan rancangan awal atau draft dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) 2025-2045. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kukar mengeluarkan aplikasi Ruang Runding.

Plt Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanesa Vilna, mengatakan aplikasi ini sengaja diterbitkan. Agar seluruh masyarakat bisa turut berpartisipasi secara langsung dalam penyusunan rancangan awal RPJPD Kukar 2025-2045.

"Dengan harapan dalam penyusunannya akan ditemukan persamaan persepsi, serta masukan, saran, ide dan gagasan dari masyarakat," katanya.

Diketahui dalam proses penyusunan dokumen rancangan awal RPJPD dimulai dengan menjaring isu-isu strategis di Kukar. Sehingga dipandang perlu untuk menjaring aspirasi dari masyarakat luas secara langsung. Ruang Runding diharap mampu menjadi penghubung

aspirasi masyarakat secara luas.

Mengingat RPJPD ini akan menjadi acuan pembangunan Kukar dalam 20 tahun kedepan. Tidak hanya itu, RPJPD ini akan menjadi pedoman bagi setiap calon kepala daerah untuk menentukan visi dan misinya.

Ia menambahkan, masyarakat yang berkeinginan menyampaikan masukan dan aspirasi untuk penyusunan RPJMD Kukar 2025-2045. Dapat langsung bergabung didalam aplikasi tersebut, setiap peserta diarahkan untuk mendaftar terlebih dahulu menggunakan akun email aktif.

"Kami akan langsung share aplikasi Ruang Runding ini melewati media sosial, media cetak, maupun disemua media informasi publik yang ada, agar dapat di akses," ucap Vanesa.

"Bahkan nanti apabila mendaftar menggunakan emailnya bisa ikut serta berunding guna memberikan masukan dan saran seperti maksud dari kegiatan kita ini," tandasnya.

**Penulis : Ady Wahyudi**

**Editor : Muhammad Rafi'i**





Ady/Radar Kukar  
Suasana Pelatihan Jurnalistik yang dilaksanakan PWI Kukar.

## Komitmen Bangun SDM Kukar, PWI Kukar Gelar Workshop Pelatihan Jurnalistik

**TENGGARONG** - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menggelar Pelatihan Jurnalistik bagi generasi muda Kukar. Dilaksanakan di Radio Pemerintah Kabupaten (RPK) Kukar, Kamis (14/9/2023).

Kegiatan yang digagas oleh Bidang Pendidikan PWI Kukar ini, turut mendatangkan pelajar dari sejumlah SMA di Kecamatan Tenggarong sebagai peserta.

Dalam pelatihan ini, para peserta disuguhkan dengan berbagai materi yang berkaitan dengan dunia jurnalistik. Mulai dari dasar-dasar jurnalistik tentang penulisan berita, peliputan berita, teknik dasar pengambilan gambar. Membuat konten video, hingga praktik langsung pembuatan berita.

Ketua PWI Kukar, Bambang Irawan, mengatakan Workshop Jurnalistik merupakan salah satu langkah dan komitmen PWI dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang handal. Terutama menjelang perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim.

Perpindahan IKN diyakininya akan diikuti oleh banyak media-media nasional, yang turut membuka kantor di IKN. Sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan pemuda asal Kalimantan Timur (Kaltim) khususnya Kukar dapat mengisi ruang-ruang tersebut.

"Kami berharap wartawannya bukan

dari orang luar, tapi pelajar-pelajar yang susah disiapkan dari sekarang menjadi wartawan. Jadi warga Kaltim tidak hanya jadi penonton di daerah sendiri," kata Bambang.

Dari pelatihan ini, para peserta juga diberikan pemahaman bahwa produk jurnalistik itu berbeda dengan media sosial. Serta mengetahui perbedaan antara berita hoaks atau bohong dan berita yang benar atau dapat dipercaya.

Disisi lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar, Dafip Haryanto, mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh PWI Kukar. Baginya kegiatan ini merupakan wujud konkret komitmen PWI dalam membentuk SDM Kukar. Salah satunya memberikan pelatihan yang menyentuh pada masyarakat langsung. Selain memperkenalkan media mainstream, juga menjabarkan cara mengolah berita sesuai kaidah penulisan jurnalistik.

Ia berpesan para peserta harus menyimak materi-materi yang diberikan oleh narasumber. Selanjutnya, bisa diimplementasikan di sekolah hingga perguruan tinggi masing-masing.

"Semoga bisa diimplementasikan dan berdampak terhadap peningkatan kualitas pengelolaan media di sekolah," pungkasnya.

**Penulis : Ady Wahyudi**

**Editor : Muhammad Rafi'i**



Istimewa

Sekkab Kukar, Sunggono, saat menghadiri rapat penyusunan rancangan awal RPJPD di Aula Bappeda Kukar.

## Pemkab Mulai Menyusun Rancangan Awal RPJPD 2025-2045

**TENGGARONG** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kukar, mulai menyusun rancangan awal atau draft dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kukar 2025-2045.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan m Kukar 20 tahunan kedepan ini, melibatkan berbagai pihak. Mulai dari unsur perangkat daerah, akademisi, dan juga para pemangku kepentingan lainnya.

Dalam prosesnya, penyusunan dokumen rancangan awal RPJPD dimulai dengan menjar-jaring isu-isu strategis. Sesuai fakta yang terjadi saat ini dan isu yang akan mungkin terjadi sampai 2045. Oleh sebab itu, diperlukan penampungan aspirasi dari berbagai pihak.

Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, yang turut mengikuti rapat penyusunan draf awal RPJPD, mengatakan Pemkab Kukar memahami tidak ada pembangunan yang sukses dan berdaya guna tanpa melalui proses perencanaan yang matang.

Oleh karenanya, proses peny-

usunan RPJPD ini harus dikawal dengan baik dan mampu men-jaring isu secara menyeluruh. Apalagi Kukar menjadi bagian integral dari kesuksesan rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Sehingga penetapan arah pembangunan akan lebih kompleks dan tidak hanya didasari tren masa lalu," jelasnya.

Sunggono menambahkan, sejauh ini Kukar memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor primer tak terbarukan, seperti migas dan batubara. Ia merasa ketergantungan terhadap sektor industri ekstraktif ini harus perlahan dihilangkan.

Sehingga diperlukan kebijakan jangka panjang, untuk menumbuhkan sektor ekonomi unggulan lain. Agar Kukar tidak terus berpangku tangan kepada sektor industri yang tak terbarukan dan sewaktu-waktu bisa habis.

Salah satu poin strategis yang perlu didorong adalah pemanfaatan tata ruang wilayah terintegrasi. Ini diikuti dengan pembangunan sektor baru terbarukan, sebagai sektor unggulan daerah. Guna menopang perekonomian daerah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Sunggono menyebut, urgensi penyusunan RPJPD saat ini sangat strategis. Mengingat tahun 2024 melaksanakan Pemilu dan Pilkada serentak untuk periode pertama RPJPD 2025-2045 yakni 2025-2030.

"Sehingga substansi rancangan awal yang akan disusun harus dapat tersampaikan dan dipahami oleh seluruh calon kepala daerah dengan baik," sambungnya.

Ia berharap, seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan penyusunan dengan efisien dan konstruktif. Selain itu, juga diharapkan pembahasan RPJPD 2025-2045 ini dapat memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada seluruh stakeholder pembangunan di Kukar.

Mengingat kebijakan yang dirumuskan nantinya, merupakan gambaran harapan dari masyarakat yang akan diperjuangkan oleh Pemkab Kukar dalam masa 20 tahun kedepan. "Saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar dapat memberikan informasi, gagasan dan pemikiran kepada Pemkab Kukar," pungkasnya.

**Penulis : Ady Wahyudi**

**Editor : Muhammad Rafi'i**





## **PERTEMUAN MEDIA KALTIM GRUP DAN KAPOLRES PPU: BAHAS SINERGITAS MEDIA, PENEGAKAN HUKUM HINGGA PERAN UMKM**



**SUDAH TERBIT SK, MAKMUR  
MARBUN DIKABARKAN JADI PJ  
BUPATI PPU GANTIKAN HAMDAM**



## SUDAH TERBIT SK, MAKMUR MARBUN DIKABARKAN JADI PJ BUPATI PPU GANTIKAN HAMDAM

**PPU** - Meskipun Pemprov Kaltim masih menunggu kepastian mengenai Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), namun nama yang kemungkinan akan mengisi posisi tersebut sudah mencuat. Bahkan sudah diterbitkan SK Mendagri.

Yaitu, Makmur Marbun, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Produk Hukum Daerah di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

Diketahui bahwa masa jabatan Bupati PPU, Hamdam, akan segera berakhir pada tanggal 19 September 2023. Hamdam Pongrewa telah menjabat sebagai Bupati PPU sejak tahun 2022 dalam periode kepemimpinan 2018 hingga 2023.

"Sudah ditetapkan calon terpilih dan sudah ada Surat Keputusan (SK) terkait hal ini, yaitu Makmur Marbun," ujar sumber Media Kaltim di Kemendagri.

Sebelumnya, pada tanggal 7 Agustus 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU telah mengusulkan beberapa nama calon Pj Bupati PPU yang akan menggantikan Hamdam Pongrewa kepada Pemprov Kaltim. Usulan mengenai nama-nama tersebut juga telah disampaikan ke Kemendagri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari 3 nama yang diusulkan, diketahui salah satu di antaranya berasal dari lingkup Pemprov Kaltim, yaitu Agus Hari Kesuma, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim.

Sedangkan dua kandidat lainnya adalah Suhardi, yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD PPU, dan Adriani Amsyar, yang merupakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik di Sekretariat Pemda PPU.

Nama-nama yang telah diajukan ke Kemendagri melalui surat yang ditandatangani oleh Gubernur Kaltim Isran Noor

termasuk Agus Hari Kesuma, Kepala Dispora Kaltim, serta Deni Sutrisno, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, dan Christianus Benny, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah, dan Kesra.

Sementara itu, nama Makmur Marbun tidak termasuk dalam usulan baik dari DPRD PPU maupun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 4/2023 tentang Penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Drs. Makmur Marbun, M.Si, yang lahir di Pakkat, Sumatera Utara pada tanggal 10 September 1964, saat ini berusia 57 tahun dan telah menjabat sebagai Direktur Produk Hukum Daerah di Direktorat Otonomi Daerah sejak tanggal 18 Agustus 2020 hingga saat ini.

"Kabarnya juga, hari ini sudah berangkat ke PPU. Persiapan untuk pelantikan Minggu depan," sebut sumber dari Kemendagri. **(SBK)**



K O R A N   D I G I T A L



TERVERIFIKASI



DEWANPERS

Lebih Banyak Berita Satu Klik



KAPOLRES PENAJAM PASER UTARA  
**AKBP HENDRIK EKA BAHALWAN, S.H., S.I.K.**

**SEMANGAT  
MENGAYOMI**



MediaKaltimGroup

Tangkapan momen kunjungan Manajemen Media Kaltim Grup ke Kapolres PPU, AKBP Hendrik Eka Bahalwan.

## PERTEMUAN MEDIA KALTIM GRUP DAN KAPOLRES PPU: BAHAS SINERGITAS MEDIA, PENEGAKAN HUKUM HINGGA PERAN UMKM

**PENAJAM** - Suasana hangat menyelimuti pertemuan antara Kapolres Penajam Paser Utara (PPU), AKBP Hendrik Eka Bahalwan, dengan Manajemen Media Kaltim Grup, Kamis (14/9/2023).

Meski berlangsung di ruang kerja yang formal, pertemuan tersebut dipenuhi canda tawa dan humor. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari "Roadshow Partnership Trip" Media Kaltim Grup.

Kunjungan dipimpin CEO Media Kaltim Agus Susanto dan Direktur Media Kaltim Rini Ernawati. Ikut mendampingi Kepala Biro

MediaKaltim PPU, Robbi Syai'an dan Jurnalis Radar Ibukota, Deddy Pz.

Mereka berdiskusi mengenai berbagai isu krusial, termasuk perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang dalam tahap pembangunan.

Pembahasan utama bagaimana membangun sinergitas antara media massa dengan penegakan hukum, yang juga menjadi salah satu prioritas kerja Polres PPU dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Kami selalu berupaya membangun komunikasi dan bahkan kolaborasi dengan awak media. Ini sangat membantu dalam pelaksanaan tugas kamtibmas," ujar perwira dengan tanda pangkat melati dua tersebut.

Selain itu, ditekankannya, bahwa fokus kerja saat ini pada pengawalan pembangunan IKN, khususnya dalam mempersiapkan masyarakat lokal PPU agar dapat berperan aktif, terutama dalam sektor peningkatan perekonomian masyarakat.

"Salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM di PPU

adalah keberadaan wadah yang memadai. Karena itu, kami berupaya memberikan tempat dan kesempatan bagi mereka untuk bersaing," ungkap Hendrik.

Hal tersebut juga menjadi pesan khusus kepada Manajemen Media Kaltim Grup agar turut membantu dalam mewujudkannya, khususnya dalam memberikan wadah bagi pelaku UMKM lokal untuk mempromosikan produk mereka.

"Saya yakin, jika diberikan wadah yang memadai, pelaku UMKM di PPU dapat bersaing dengan produk-produk dari luar daerah yang akan hadir di IKN," tegasnya.

Isu tersebut hanya salah satu dari banyak hal yang dibahas dalam pertemuan. Hendrik juga mengapresiasi konsistensi Media Kaltim Grup dalam menyampaikan informasi kepada pembaca, khususnya di PPU.

Sebagai balasan, Media Kaltim Grup memberikan cinderamata berupa poster eksklusif dengan tulisan "Semangat Mengayomi", yang menggambarkan sosok Hendrik dalam menjalankan tugasnya. **(SBK)**



K O R A N   D I G I T A L



Lebih Dari Satu Klik

TERVERIFIKASI



DEWANPERS



KEPALA DISKOMINFO PPU

**KHAIRUDIN NISSE**

**RAMAH  
BERSAHAJA**



MediaKaltimGroup

Penyerahan cinderamata berupa poster eksklusif dari Media Kaltim dengan tulisan “Ramah Bersahaja” kepada Kepala Diskominfo PPU, Khairudin Nisse.

## MEDIA KALTIM GRUP SAMBANGI DISKOMINFO PPU: BAHAS PENGEMBANGAN INFORMASI PUBLIK HINGGA PEMBERITAAN BERKUALITAS

**PENAJAM** - Sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kerja dengan pemerintahan Benuo Taka, Media Kaltim Grup berkunjung ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Penajam Paser Utara (PPU), Kamis (14/9).

Melalui program “roadshow partnership trip” ini, mempertemukan manajemen Media Kaltim Grup dengan Kepala Diskominfo PPU, Khairudin Nisse. Kunjungan dipimpin CEO Media Kaltim Agus Susanto, Direktur Media Kaltim Rini Ernawat, bersama Kepala Biro MediaKaltim PPU, Robbi Syai’an serta Jurnalis Radar Ibukota, Deddy Pz.

Sebagai tanda penghargaan dan apresiasi, Media Kaltim Grup menyerahkan cinderamata be-

rupa poster eksklusif dengan tema “Ramah Bersahaja” kepada Khairudin. Poster tersebut menggambarkan sosok Khairudin, seorang pemimpin yang dikenal ramah dan bersahaja di Diskominfo PPU.

Mengawali pertemuan, Agus Susanto, menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin selama ini. “Meskipun Media Kaltim Grup baru berusia tiga tahun, kami berkomitmen menjadi jembatan informasi antara program dan kebijakan pemerintah dengan warga PPU,” ungkapnya.

Berbagai hal dibahas dalam pertemuan ini, salah satunya mengenai pengembangan informasi publik di daerah yang dikenal dengan sebutan Benuo Taka. Meskipun topik pembahasan

cenderung serius, suasana pertemuan tetap santai dan penuh keakraban.

Sementara Khairudin Nisse menekankan pentingnya kerjasama dengan media dalam pembangunan daerah. “Pemberitaan yang objektif, transparan, dan sesuai regulasi sangat kami harapkan. Jika ada kritik untuk pemerintah, kami siap menerimanya sebagai bentuk kontrol dari masyarakat,” jelasnya.

Khairudin juga berharap agar para jurnalis senantiasa mengedepankan kode etik jurnalistik. “Kami selalu terbuka menerima masukan dan saran dari rekan-rekan media, terutama dari Media Kaltim Grup, untuk menciptakan sinergi dan kerja sama yang lebih efektif,” pungkasnya. **(SBK)**



K O R A N   D I G I T A L



TERVERIFIKASI



DEWANPERS

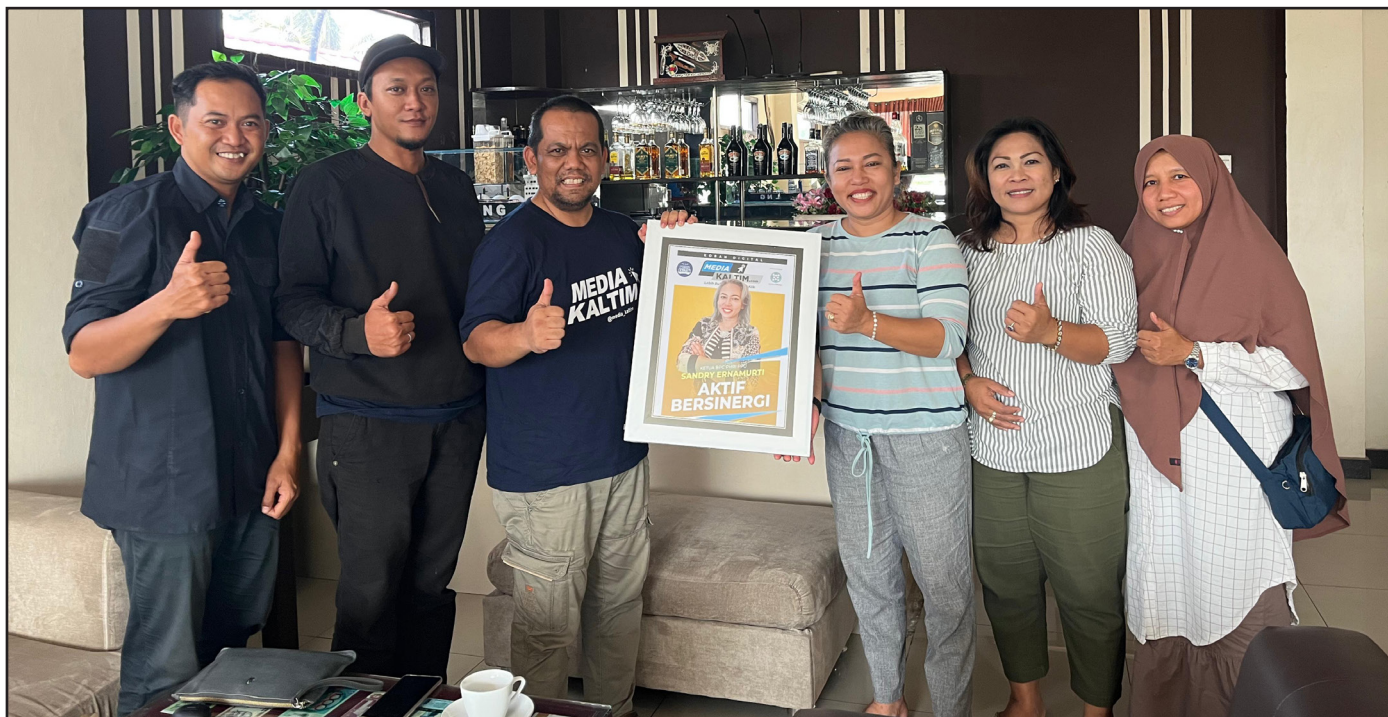
Lebih Del... Klik



KETUA BPC PHRI PPU

**SANDRY ERNAMURTI**

**AKTIF  
BERSINERGI**



## MEDIA KALTIM GRUP DAN BPC PHRI PPU KOLABORASI GALI POTENSI PARIWISATA JELANG PEMINDAHAN IKN

**PENAJAM** – Penajam Paser Utara (PPU) dikenal dengan potensi pariwisatanya yang menarik. Meski demikian, sepertinya masih kurang keseriusan dalam pengembangannya, terutama menjelang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal tersebut diungkapkan Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) PPU, Sandry Ernamurti, dalam pertemuan dengan Media Kaltim Grup. Ikuti mendampingi Siska, Owner The Rich Hotel, yang juga anggota PHRI.

Sementara dari Media Kaltim Grup, rombongan dipimpin CEO Media Kaltim Grup Agus Susanto dan Direktur Media Kaltim Rini Ernawati bersama Kepala Biro PPU Media Kaltim Robbi Syai'an, dan Redaktur Radar Ibukota Deddy Pz.

Pada pertemuan yang berlangsung dalam rangka "Roadshow Partnership Trip" di Benuo Taka, Kamis (14/9/2023) di The Rich Hotel, Lawe-Lawe, kedua

pihak menekankan pentingnya peran aktif media dalam pengembangan serta promosi pariwisata di PPU.

Sandry Ernamurti mengungkapkan harapannya agar PPU dapat memanfaatkan potensi wisata yang dimilikinya dengan lebih maksimal, khususnya menjelang pemindahan IKN. "PPU memiliki beragam potensi wisata yang menarik dan perlu strategi khusus untuk mempromosikannya," kata Sandry.

Salah satu isu yang ditekankan adalah pentingnya kebijakan dari pemerintah daerah guna mendorong perkembangan industri pariwisata.

"Pembangunan IKN di Sepaku telah dimulai. Ini adalah peluang yang harus kita manfaatkan. PPU memiliki nilai jual yang sangat menjanjikan, apabila disiapkan dengan matang," tuturnya.

Menurut Sandry, apabila pariwisata disiapkan dengan benar, investasi di bidang ini akan sangat signifikan mengingat potensi

besar di PPU.

Penguatan industri pariwisata di PPU tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat, namun juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena itu, pertemuan dengan manajemen Media Kaltim dianggap sebagai solusi penting. Peran media dalam menyebarkan informasi menjadi kunci dalam hal ini.

Selain memfokuskan isu-isu pariwisata lokal, media juga harus mengidentifikasi berbagai hambatan serta memberikan dukungan dalam promosi.

"Mengambil peran dalam memajukan daerah merupakan komitmen Media Kaltim Grup di PPU. Melalui pertemuan ini, kami berkomitmen bersama untuk mengawal isu-isu pariwisata, sejalan dengan pembangunan IKN," pungkas Agus Susanto. (SBK)

**Pewarta: Robbi Syai'an**  
**Editor: Agus Susanto**



# HASIL PATROLI SATPOL PP, MASIH ADA POSTER CALEG TAK TAAT ATURAN



14/09/2023 10:09:02  
01361073 117488463  
29.16 m  
0.78 m  
0.89° (149.81°)  
Capture by Ryan S  
Jalan Mulawarman, Bontang Utara, Kota  
Bontang, 75311, Kalimantan Timur, Indonesia

**BACA HALAMAN A2**



**BAKHTIAR WAKKANG:  
ADA CELAH MASYARAKAT  
BISA PELIHARA BUAYA!**



IST

Kegiatan patroli rutin Satpol PP.

# Hasil Patroli Satpol PP, Masih Ada Poster Caleg Tak Taat Aturan

**BONTANG** - Satpol PP Kota Bontang kembali melaksanakan razia baliho dan poster di sudut-sudut dan sepanjang jalan Kota Taman. Dari sekian banyak yang dirazia, masih terdapat baliho maupun poster caleg yang tidak menaati aturan yang berlaku.

Kepala Bidang PPUD Satpol-PP, Eko Mashudi mengatakan, masih ada caleg yang memasang poster di pinggir-pinggir jalan, walaupun tidak dalam jumlah banyak.

"Pagi ini kami berpatroli dan masih mendapati poster caleg," jelasnya saat

dihubungi redaksi, Kamis (14/9/23).

Tidak ada aduan terkait poster tersebut, dan bukan hanya poster caleg saja, setiap spanduk yang terpasang tidak pada tempatnya akan ditertibkan, termasuk perizinan pemasangan reklamenya.

Eko menambahkan, penumpukan poster dan spanduk caleg sempat terjadi, namun pihaknya telah bersurat ke pimpinan partai politik terkait agar tidak memasang spanduk tanpa izin.

"Jumlah spanduk yang kami dapat jauh menurun dari sebelumnya. Se-

belumnya kami bersurat pada setiap pimpinan Parpol untuk mengurus perizinan pemasangan reklame atau baliho," tambahnya.

Ia juga mengungkapkan, tidak ada sanksi yang berat untuk parpol terkait, hanya saja poster atau spanduk mereka akan dicopot jika didapati di lokasi.

"Hal seperti ini sering terjadi tiap menuju pemilihan, hanya saja harus tetap mengikuti aturan yang ada," imbuhnya.

**Penulis: Syakurah**

**Editor: Yusva Alam**





YUSVA ALAM

Sidak Komisi I DPRD Bontang di proyek pembangunan Kantor Kelurahan Berbas Tengah.

## Komisi I Optimistis Proyek Kantor Lurah Berbas Tengah Kelar Sebelum Tahun Baru

**BONTANG** – Komisi I DPRD Bontang melakukan sidak lapangan ke proyek pembangunan Kantor Kelurahan Berbas Tengah, Rabu (13/9/2023) kemarin. Sidak diikuti oleh Wakil Ketua Komisi I, Raking dan Sekretaris Komisi I, Irfan.

Dikatakan Raking, progres pembangunan di Kantor Lurah Berbas Tengah ini sudah mencapai 50 persen dari target yang ditetapkan. Artinya, pihaknya optimistis proyek ini akan selesai sesuai dengan target yang dicantumkan, yaitu di November 2023 mendatang.

"Kami yakin sebelum tahun baru kantor ini sudah bisa dioperasikan," ujarnya usai sidak.

Namun begitu, pihaknya mewanti-wanti terkait masalah keselamatan para pekerja. Lantaran

proyek yang dikerjakan oleh CV Silpia Rusmana tersebut tidak terlalu memperhatikan masalah keamanan pekerjaannya. Masih terlihat ada beberapa pekerja yang tidak menggunakan helm dan hanya mengenakan sandal.

"Kata Pak Irfan nyawa itu gak bisa dibeli. Ownernya bilang ada aja perlengkapan safetynya, namun para pekerjaannya yang tidak terbiasa memakainya. Ya seharusnya ditegaskan untuk selalu memakai perlengkapan safety," tegasnya.

Sementara untuk BPJS dipastikan aman, lantaran pihak perusahaan sudah mendaftarkan seluruh pekerjaannya di BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem kontrak. BPJS hanya berlaku selama proyek berlangsung. (al/adv)



Komisi III DPRD Bontang saat memimpin RDP, Senin (11/9/2023) lalu.

## Akses Jalan Masuk ke Calon Pemakaman Bontang Barat Sudah Dihibahkan

**BONTANG** – Kabid Pertanahan Dinas Perkim Bontang, Ishak Karangan menyebut, saat ini progres calon lahan pemakaman di Bontang Barat sudah sampai pada penyerahan akses jalan oleh pemilik.

Hal itu diungkapkannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Bontang bersama pemilik lahan terkait lahan pemakaman Bontang Barat, Lahan RTH BSD, dan Lahan RTH di Jalan Brokoli di Kelurahan Gunung Elai, Senin (11/9/2023).

Dijelaskan Ishak, saat ini pemilik tanah yang bakal digunakan sebagai akses masuk menuju calon Lahan Pemakaman Bontang Barat tersebut, sudah menyerahkan kepada Pemkot Bontang. Sehingga saat ini sudah ada kejelasan masalah legalitas akses jalan masuk itu.

“Pemilik tanah sudah hibahkan secara formal, bahkan sudah teregistrasi di Kantor Lurah Kanaan. Sehingga sudah ada hitam di atas putihnya bahwa tanah untuk akses masuk itu sudah diserahkan,” jelasnya.

Berikutnya yang akan dilakukan pihaknya adalah

pengukuran lahan di awal Oktober mendatang. Pengukuran lahan lebih valid dengan menghadirkan para saksi batas. Lantaran pengukuran sebelumnya tak ada saksi batas.

“Secara umum calon lahan pemakaman Bontang Barat itu sudah direkomendasikan. Sekarang hanya tinggal mengurus legalitasnya saja,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina mengaku masih meraba-raba terkait calon lahan pemakaman Bontang Barat ini. Lantaran lahan tersebut masih dalam tahap kajian tim akademis dari Universitas 11 Maret Surakarta.

“Kami masih tunggu hasil kajiannya secara akademis apakah layak dimanfaatkan dengan baik. Apakah cocok untuk pemakaman atau tidak,” pungkasnya.

Diketahui, calon lahan Pemakaman Bontang Barat yang direkomendasikan berada di Kelurahan Kanaan tepatnya di seberang Pemakaman Toraja, atau di belakang Musala Babussalam. (al/adv)





IST

Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang.

## Bakhtiar Wakkang: Ada Celah Masyarakat Bisa Pelihara Buaya!

**BONTANG** – Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang menyoroti rencana relokasi Buaya Riska. Menurutnya ada celah dari UU yang ada, agar masyarakat bisa memelihara buaya.

Politisi Partai Nasdem ini menyoroti aspek hukum terkait pemeliharaan buaya yang telah lama dirawat oleh Ambo, warga Guntung.

BW sapaan akrabnya mengingatkan, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati memberikan celah bagi masyarakat untuk memelihara buaya.

"Hal ini dapat dilakukan setelah mendapatkan izin penangkaran, dengan penekanan bahwa Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) akan melakukan pemantauan rutin terhadap perjalanan

penangkaran tersebut. Lembaga konservasi atau penangkaran yang telah mendapat izin memiliki hubungan kemitraan dengan BKSDA," bebernya.

Bakhtiar Wakkang juga mengungkapkan bahwa BKSDA memiliki kewenangan untuk menitipkan buaya hasil tangkapan atau penyerahan warga kepada lembaga konservasi atau penangkaran perorangan untuk perawatan lebih lanjut.

Dengan demikian, ia berpendapat bahwa persoalan yang melibatkan Pak Ambo dapat difasilitasi dengan menghubungi BKSDA untuk melakukan asesmen dan pemeliharaan lebih lanjut terhadap buaya tersebut, dengan memastikan bahwa buaya tersebut memenuhi kriteria yang diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1990. (al/adv)



# RODA EMPAT RESMI DIIZINKAN MELINTAS JEMBATAN SAMBALIUNG, **BOBOT MAKSIMAL 4 TON**



**MANGUATI BANUA JELANG HUT BERAU,  
PROSESI ADAT AGAR SELAMAT DAN  
TERHINDAR DARI MARA BAHAYA**





Kendaraan roda empat resmi diperbolehkan melintas di Jembatan Sambaliung.

## RODA EMPAT RESMI DIIZINKAN MELINTAS JEMBATAN SAMBALIUNG, BOBOT MAKSIMAL 4 TON

**TANJUNG REDEB** - Jembatan Sambaliung secara resmi telah dibuka bagi kendaraan roda empat. Namun, masih diberi batas bobot maksimal 4 ton lantaran kekuatan jembatan masih 85 persen.

Pembatas jalan juga terlihat masih terpasang di kedua ujung jembatan untuk menghalangi mobil besar yang lewat.

Dengan mengucapkan shalawat dan memegang bendera, Bupati Berau Sri Juniarsih meresmikan Jembatan Sambaliung tersebut. Ratusan kendaraan tampak memadamati jembatan usai diresmikan.

Dikatakannya, pembukaan Jembatan Sambaliung itu menjadi momentum hadiah bagi ulang tahun Kabupaten Berau yang ke-70 tahun.

Ia juga meminta masyarakat

untuk tetap berhati-hati karena jembatan belum sepenuhnya dibuka untuk umum. Terutama bagi kendaraan besar dengan muatan lebih dari 4 ton masih menyeberang menggunakan Landing Craft Tank (LCT).

"Kekuatan jembatan baru 85 persen. Masyarakat tetap harus berhati-hati," katanya, Kamis (14/9/2023).

Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau Madri Pani menuturkan, dibukanya Jembatan Sambaliung sudah menjadi kewajiban. Berbagai sektor perlahan akan mulai kembali pulih. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan hingga perekonomian masyarakat.

"Dengan dibukanya akses jembatan ini berarti membuka sele-

bar-lebarnya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas seperti sebelumnya," ungkapnya.

Dirinya juga menaruh simpati dengan kejadian beberapa waktu lalu, ketika jenazah warga Sambaliung terpaksa ditandu melewati Jembatan Sambaliung. Sebab ambulans belum diperbolehkan melintas.

"Kasihan juga harusnya ada pengecualian kalau memang dilarang melewati. Dan harus ada penjaganya karena itu proyek besar," tegasnya.

"Mudah-mudahan dengan diperbolehkannya roda empat melintasi Jembatan Sambaliung ini perekonomian masyarakat di pesisir Berau dapat kembali," harapnya.

**Pewarta: Amnil Izza**  
**Editor : Nicha Ratnasari**

# MANGUATI BANUA JELANG HUT BERAU, PROSESI ADAT AGAR SELAMAT DAN TERHINDAR DARI MARA BAHAYA

**TANJUNG REDEB** - Menjelang hari jadi Kabupaten Berau yang ke-70 tahun dan Kota Tanjung Redeb yang ke-213 tahun, prosesi Manguati Banua dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau di Keraton Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kamis (14/9/2023).

Prosesi Manguati Banua dimulai dengan pemotongan puncak rasul, makanan khas Berau berupa ketan yang disusun seperti tumpeng yang datar. Yang di sekelilingnya terdapat telur yang ditancapkan dengan lidi. Pemotongan tersebut dilakukan oleh Bupati Berau Sri Juniarsih, yang kemudian piring pertama diberikan kepada Sultan Sambaliung, Datu Amir.

Beralih ke dalam Keraton Sambaliung, para pejabat beserta tokoh adat melakukan doa bersama sesuai ajaran agama Islam. Memohon agar senantiasa diberikan keselamatan dan terhindar dari mara bahaya.

Sebab, Kesultanan Sambaliung merupakan salah satu kerajaan yang menjunjung tinggi syariat Islam. Mulai dari keturunan awal sampai saat ini adalah insan yang taat beragama.

Setelah makan bersama, Manguati Banua ditutup dengan mengarak Parahu Alus atau menghanyutkan perahu kecil yang berisi satu sisir pisang dan satu butir telur yang telah diberi doa oleh tetua adat Sambaliung.

Parahu kecil tersebut kemudian dihanyutkan di Sungai Kelay. Wakil Bupati Berau Gamalis beserta Sultan Sambaliung turut mengantarkan perahu kecil tersebut ke tengah sungai.

Tujuannya, setelah perahu diantar masyarakat Berau selain dihilangkan dari segala penyakit, juga mensejahterakan kehidupan orang Banua. Diharapkan masyarakat dapat bersatu



Prosesi menghanyutkan Parahu Alus di Sungai Kelay yang diantarkan oleh Wakil Bupati Berau Gamalis serta Sultan Sambaliung Datu Amir.

dalam Manguati Banua untuk kemajuan Berau dengan diantar parahu alus ke sungai itu.

"Tradisi tersebut merupakan awal dari rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Berau yang ke-70 tahun," kata Bupati Berau Sri Juniarsih, Kamis (14/9/2023).

Ia berharap prosesi adat tersebut dapat terlaksana setiap tahun dan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, bukan hanya yang berada di empat kecamatan terdekat saja. Supaya semua dapat merasakan kemeriahian hari jadi Berau tercinta.

"Ini merupakan upaya pelestarian adat budaya asli Berau. Kami sadar budaya bukan hanya bertujuan mempertahankan adat istiadat tapi juga menjadi daya tarik wisata yang otentik di Berau," terangnya.

Sri berkomitmen akan terus menjaga potensi wisata tersebut agar dapat dikembangkan dan tentunya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Berau.

Dengan meningkatnya pariwisata Berau pastinya akan menarik minat wisatawan untuk

berkunjung ke Bumi Batiwakkal. Yang datang untuk melihat kebudayaan asli Berau.

"Bukan hanya itu, UMKM juga akan semakin baik ke depan. Sehingga kesejahteraan masyarakat Berau juga meningkat," ucapnya.

Program pelestarian adat budaya bahari terus dilakukan agar budaya asli Berau dapat dijaga. Peringatan hari jadi Berau menjadi momentum untuk merawat adat budaya tersebut.

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Syarifatul Syadiah pun memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam prosesi Manguati Banua. Terutama kepada Kesultanan Sambaliung yang tetap menjaga adat istiadatnya selama ini.

"Karena acara ini rutin tahunan, harapan kami Kesultanan Sambaliung dengan adat-adat ini tetap kita tonjolkkan, kita jaga dan rawat sebaik-baiknya karena inilah Berau dengan dua kesultanan, yaitu Sambaliung dan Gunung Tabur," ungkapnya.

**Pewarta: Amnil Izza**

**Editor : Nicha Ratnasari**





# POLDA KALTIM TANGKAP TKI ILEGAL BAWA SABU 3 KG KUALITAS SUPER DARI MALAYSIA



**PENGENDARA MOTOR TEWAS  
USAI HANTAM TRUK DLH  
DI GUNUNG MALANG**



Foto: Kasubbid Penmas Bidhuma Polda Kaltim, AKBP I Nyoman Wijana dan Panit Sidik Subdit I, Ipda Candra Silalahi menunjukkan barang bukti sabu 3 kg.

## POLDA KALTIM TANGKAP TKI ILEGAL BAWA SABU 3 KG KUALITAS SUPER DARI MALAYSIA

**BALIKPAPAN** - Polda Kaltim melalui Subdit I Ditreskoba berhasil menangkap seorang pemuda berinisial MS (21) yang merupakan seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dan membawa narkoba jenis sabu, di kawasan Kariangau, Balikpapan Barat pada Kamis (7/9/2023) lalu.

Kasubbid Penmas Bidhuma Polda Kaltim, AKBP I Nyoman Wijana mengatakan, tersangka membawa sabu dari Malaysia dan membawanya hingga ke Balikpapan melalui jalur darat, hingga akhirnya ditangkap pada

Kamis dinihari sekitar pukul 00.15 wita.

"Pelaku merupakan TKI ilegal. Dan sabu ini didapatnya dari Malaysia kemudian dibawa ke Balikpapan lewat darat seorang diri," ujarnya, Kamis (14/9/2023).

Lebih lanjut Nyoman menjelaskan, barang bukti sabu yang didapat dari tangan tersangka sebanyak 3.073 atau 3 kilogram lebih dengan kualitas super.

"Sabu dibawa dan dibungkus menggunakan bungkus teh hijau. Dan setelah di tes, kualitas sabu ini memiliki kualitas super. Bagus sekali ini," jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan, belum diketahui akan diantar kemana paket sabu ini. Pasalnya, tersangka hanya diminta untuk membawanya ke Balikpapan saja dengan upah sebesar Rp 50 juta.

"Kita masih dalam lagi siapa yang akan ambil barang ini. Dia diminta sampai di Balikpapan aja dengan upah Rp 50 juta," tambah I Nyoman.

Atas perbuatannya, tersangka pun terancam hukuman paling ringan 10 tahun dan paling berat seumur hidup.

**Penulis: Aprianto**

**Editor: Nicha Ratnasari**





Korban AL pesepeda motor yang tewas usai menabrak truk sampah milik DLH Balikpapan di Jalan Mayjend Sutoyo pada Kamis dini hari.

## PENGENDARA MOTOR TEWAS USAI HANTAM TRUK DLH DI GUNUNG MALANG

**BALIKPAPAN** - Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan tewasnya pengendara, kembali terjadi di Kota Balikpapan pada Kamis (14/9/2023) dini hari tadi. Kecelakaan terjadi di Jalan Mayjend Sutoyo, Balikpapan Tengah.

Dalam kecelakaan ini seorang pengendara sepedamotor berinisial AL (22) tewas saat dilarikan ke rumah sakit usai dirinya menghantam sebuah truk dari arah berlawanan.

Kasat Lantas Polresta Balikpapan, Kompol Ropiyani membenarkan kejadian tersebut saat dikonfirmasi. Di mana insiden kecelakaan maut itu melibatkan kendaraan sepeda motor KT 6775 HC yang dikemudikan AL dengan truk pengangkut sampah milik DLH bernomor polisi KT 8608 A yang dikemudikan SH (46).

Kecelakaan bermula saat AL melintas dari arah Hotel Marbo menuju simpang traffic light Gunung Malang. Saat tiba di jalan menikung ke kiri tepatnya di depan Gudang Bulog Balikpapan. AL kehilangan kendali sepe-

da motornya hingga keluar dari jalur kendaraan.

"Korban masuk ke jalur sebelahnya dan menabrak bagian depan truk sampah yang datang dari arah berlawanan," ujarnya.

Lebih lanjut Ropiyani menjelaskan, akibat dari tabrakan itu korban AL mengalami sejumlah luka pada bagian kaki dan kepalanya. Korban pun saat itu sempat dibawa menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Namun nahas, baru beberapa jam nyawa korban tak tertolong.

"Korban meninggal saat dibawa ke rumah sakit," jelasnya.

Terpisah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan, Sudirman turut membenarkan peristiwa kecelakaan maut yang melibatkan truk pengangkut sampah milik DLH itu.

Dirman mengaku truk sampah yang terlibat kecelakaan dini hari tadi baru saja mengangkut sampah dari bak sampah yang berada di depan Gajah Mada Store di Jalan Mayjend Sutoyo.

Saat hendak melanjutkan perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Beriman. Pengemudi truk sampah milik DLH melihat motor yang dikemudikan AL melaju dengan kecepatan tinggi dan melebar kelajur truk saat berada di jalan menikung.

"Sopir ini sempat berusaha untuk menghindar. Tapi karena motor sewaktu kejadian cukup kencang, tabrakan nggak bisa dihindari," ujar Sudirman.

Setelah terlibat kecelakaan, pengendara sepeda motor AL pun terpelanting hingga masuk ke dalam parit di pinggir Jalan Mayjend Sutoyo. AL masih sadar dan sempat berkomunikasi saat masih berada di parit.

Kendati demikian, nyawa AL tak tertolong meski sempat mendapat perawatan medis dari rumah sakit akibat mengalami luka cukup serius pada bagian kepalanya.

**Penulis: Aprianto**  
**Editor: Nicha Ratnasari**



Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo.

## SOAL KARHUTLA, POLDA KALTIM BELUM TEMUKAN PELAKU PEMBAKARAN HUTAN

**BALIKPAPAN** - Polda Kaltim mencatat kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Timur hingga September 2023 mencapai 108 kejadian. Dan hingga saat ini Karhutla terbanyak terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan total 45 kasus.

Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah Kukar disusul Kubar 29 kejadian dan Berau 20 kejadian. Namun dari seluruh kasus tersebut, hingga kini belum menemukan satu orang pun pelaku pembakaran hutan yang diduga sengaja melakukan pembukaan lahan.

"Saat personil tiba di lokasi kebakaran nggak satupun orang atau diduga yang membakar itu berada di titik munculnya api," ujarnya, Kamis (14/9/2023).

Lebih lanjut Yusuf menjelaskan, selain menemukan pelaku pihaknya juga kesulitan untuk mencari saksi. Pasalnya, lokasi yang terbakar jauh dari pemukiman atau jangkauan warga.

"Jauhnya jangkauan lokasi kebakaran hutan membuat petugas memakan waktu cukup lama untuk tiba di titik api," jelasnya.

Hal itu diduga menjadi kesempatan para pelaku untuk melarikan diri usai melakukan pembakaran. Alhasil kepolisian yang tiba di

lokasi kebakaran pun melakukan upaya-upaya lainnya seperti membantu petugas damkar melakukan pemadaman api bersama-sama.

"Rata-rata kan lahan yang terbakar ini berada jauh dari pemukiman warga di tengah hutan," tambah Yusuf Sutejo.

Selain itu, kepolisian juga melakukan tindakan edukasi kepada masyarakat, terutama di daerah rawan kebakaran ataupun daerah dengan titik hotspot terbanyak di Kaltim.

Upaya-upaya itu berupa pemasangan papan himbauan yang dipasang di lokasi rawan kebakaran dan di pemukiman warga agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Mengingat pula musim kemarau panjang serta El-Nino saat ini berpotensi menimbulkan api akan semakin mudah merambat ke lokasi lainnya terutama di daerah-daerah yang mengalami kekeringan.

"Sempat kemarin berpatroli jarak jauh beberapa waktu lalu langsung dengan bapak Kapolda. Itu sengaja kita lewat darat untuk memantau langsung bagaimana situasi di daerah," tutupnya.

**Penulis: Aprianto**

**Editor: Nicha Ratnasari**





Tim advokasi warga Desa Telemow, Sepaku saat mendampingi warga Desa Telemow diperiksa di Polda Kaltim perihal laporan dari PT ITCI Kartika Utama tentang penyerobotan lahan.

## DITUDING SEROBOT LAHAN PERUSAHAAN, WARGA DESA TELEMOW DIPERIKSA DI POLDA KALTIM

**BALIKPAPAN** - Warga Desa Telemow, Sepaku, Penajam Paser Utara saat ini tengah menghadapi konflik agraria dengan PT ITCI Kartika Utama, dan berujung pada dilaporkannya sejumlah warga Desa Telemow ke Polda Kaltim atas tuduhan penyerobotan lahan.

Pada Kamis (14/9/2023) sekitar pukul 13.00 wita, tiga orang warga Desa Telemow di antaranya Saki-us Sape, Marthen Sulo dan Titus Tomangke pun memenuhi panggilan penyidik Ditkrimum Polda Kaltim. Ketiga warga tersebut pun didampingi oleh LBH Tanah Un-tuk Rakyat dan Walhi Kaltim.

Salah satu tim advokasi warga, Fathul Huda mengatakan, permasalahan ini sebenarnya sudah pernah terjadi di Polres PPU pada tahun 2019. Namun karena tidak ada kejelasan, Polda Kaltim pun menarik kasus ini. Dan baru saat ini warga kembali diminta keterangan penyidik.

"Hari ini harusnya yang diperiksa itu ada 5 warga Desa Telemow. Tapi karena satu sakit dan satu sedang kerja di luar pulau, maka yang bisa hadir cuma 3 orang aja," ujarnya, Kamis (14/9/2023).

Lebih lanjut Fathul menjelaskan, tuduhan yang disematkan kepada warga Desa Telemow diyakinannya sangat tidak mendasar dan diduga ada upaya perampasan lahan milik warga untuk kepentingan investasi perusahaan PT ITCI Kartika Utama.

"Masyarakat di sana itu lebih dulu ada dari pada perusahaan itu. Jadi dari mana ceritanya jika masyarakat ini yang mengambil lahan PT ITCI Kartika Utama," jelasnya.

Ditambahkan Ardiansah, yang juga tim advokasi warga mengaku, saat ini warga memegang legalitas tanahnya berupa segel dan surat keterangan penguasaan tanah (SKT). Bahkan banyak saksi hidup yang mengetahui riwayat

tanah dan warga pribumi di sana.

"Sempat dikatakan juga oleh pihak perusahaan bahwa di sana ada mafia tanah yang menjual belikan lahan Desa Telemow kepada para pendatang. Ini nggak benar," tegasnya.

Ardiansah menjelaskan, masyarakat setempat akan tetap bertahan dan tidak akan pergi meski ada iming-iming dari pemerintah dan perusahaan.

Untuk itu tim advokasi warga berharap ada klarifikasi dari warga setempat, bahwasannya warga tidak pernah merebut atau mengambil bahkan masuk dalam kawasan lahan milik PT ITCI Kartika Utama.

"Kami mewakili warga dan masyarakat di sana memiliki hak yang sama sebagai warga negara juga. Berhak untuk mendapat kehidupan yang layak dan mencari ekonomi juga," tutupnya.

**Penulis: Aprianto**

**Editor: Nicha Ratnasari**



# BULOG SEGERA SALURKAN RATUSAN TON BERAS PROGRAM BPN DI PASER



**POLISI INGATKAN WARGA SOAL SANKSI  
BUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR**





Penyaluran beras BPN oleh Kancapem Perum Bulog

## BULOG SEGERA SALURKAN RATUSAN TON BERAS PROGRAM BPN DI PASER

**PASER** - Program penyaluran Bantuan Pangan Nasional (BPN) oleh Pemerintah Pusat melalui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) bakal kembali disalurkan untuk Kabupaten Paser.

Penyaluran berupa beras itu nantinya merupakan tahap kedua yang direncanakan pada September 2023 ini. Sebelumnya, sebanyak 397 ton beras sudah disalurkan ke masyarakat Kabupaten Paser. Bantuan itu disalurkan pada April hingga Juni 2023 lalu.

"Selanjutnya tahap II kemungkinan pada September ini dimulai," kata Kepala Kantor Cabang Pembantu Perum Bulog Tanah Grogot, A. B. Mukti Wibowo, Kamis (14/9/2023).

Berbeda dari tahap pertama, untuk di tahap kedua ini, Kancapem Perum Bulog Tanah Grogot, bakal menyalurkan 655 ton, namun untuk 2 Kabupaten, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser.

Mukti menyebut, penyaluran dipastikan terlaksana setelah pihaknya mendapat rekomendasi dari masing-masing Pemerintah Kabupaten (Pekab) setempat. Sementara terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pihaknya turut menunggu dari

Pekab pula.

"Untuk tahap dua ini ada 655 ton yang disalurkan kepada KPM di 2 Kabupaten," ungkapnya.

Dalam penyaluran ini, Kancapem Perum Bulog Tanah Grogot menggaet anak usaha Perum Bulog yaitu PT Jasa Prima Logistik (JPL) yang akan mendistribusikan ke KPM. Sementara data penerima ditentukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI yaitu yang masuk dalam KPM.

Tiap KPM, dijelaskan Mukti, akan menerima tiga kali dan tiap penerimaan jumlahnya mencapai 10 kilogram (kg) beras. Mukti menargetkan September 2023 ini sudah mulai diluncurkan dan penyaluran.

Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Paser, Taharuddin menyampaikan, dalam waktu dekat akan diumumkan penyaluran, beserta jadwal penyaluran. Ia memastikan September, Oktober, dan November 2023 merupakan jadwal penyaluran.

"Kita masih menyesuaikan jadwal pimpinan di daerah agar hadir saat launching," kata Taharuddin.

**Pewarta : Bhakti Sihombing**

**Editor : Nicha Ratnasari**

## POLISI INGATKAN WARGA SOAL SANKSI BUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR

**PASER** – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Paser mencatat, sebanyak 91 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah terjadi di Kabupaten Paser, hingga pertengahan September 2023 ini.

Dari total kasus tersebut, luasan lahan yang terbakar mencapai 300,85 hektare yang tersebar di 10 Kecamatan. Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Paser, Ruslan menyebut, kasus kebakaran yang terjadi diduga disebabkan adanya unsur kesengajaan oleh oknum masyarakat.

“Memang ada unsur sengaja oleh masyarakat, melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar,” kata Ruslan, saat dikonfirmasi, Selasa (12/9/2023) lalu.

Sementara, meluasnya kebakaran yang kerap terjadi, ditambahkan Ruslan, karena pada proses pemadaman juga didapatkan dengan kendala. Kendala itu di antaranya peralatan yang terbatas dan ketersediaan air yang sulit didapatkan khususnya di lokasi pemadaman terdekat.

“Kendalanya itu berupa embung yang jauh dari titik kebakaran. Termasuk debit air sungai mulai mengering,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resort (Polres) Paser, IPTU Helmi Septi Saputro menyatakan, hingga kini pihaknya masih terus menyelidiki kasus karhutla yang marak terjadi.

“Masih penyelidikan. Ya kami masih cek cek saja,” kata Helmi



Proses penanggulangan karhutla oleh petugas

saat dihubungi, Kamis (14/9/2023).

Kendati belum ada tersangka dari sederet kasus itu, Helmi tetap mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Jika terbukti, tentunya hal itu akan berdampak pada jeratan pidana bagi pelaku.

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pada pasal 50 ayat 3 huruf d, bahwa ancaman hukumannya 15 tahun penjara atau denda Rp 5 miliar,” tegas Helmi.

Diketahui, Kabupaten Paser telah menetapkan siaga darurat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) RI nomor 11 tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Karhutla, sejak Senin 24 Juli 2023 lalu.

Dari 91 kasus yang terjadi, Kecamatan Tanah Grogot tercatat sebagai wilayah dengan kejadian terluas mencapai 169 hektare dengan 44 kejadian. Sementara

wilayah terluas kedua yaitu Kecamatan Long Kali mencapai 57,65 hektare dengan 7 kejadian.

Berbeda dengan Kecamatan Paser Belengkong dengan luasan yang terbakar mencapai 41,6 hektare namun dengan 8 kejadian. Di Kecamatan Muara Samu, luasan wilayah yang terbakar mencapai 10,92 hektare dengan 6 kejadian.

Di Kecamatan Long Ikis luasan wilayah yang terbakar mencapai 5,7 hektare dengan kejadian. Uniknya, di Kecamatan Batu Engau luasan wilayah yang terdampak hanya 5,48 hektare namun peristiwa kebakarannya mencapai 13 kejadian.

Sementara Kecamatan Tanjung Harapan luasan wilayah yang terbakar mencapai 5 hektare dengan jumlah 3 kejadian. Di Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Kuaro kasus kebakaran mencapai 1 hektare dan 0,5 hektare yang masing-masing 1 kejadian.

**Pewarta : Bhakti Sihombing**  
**Editor : Nicha Ratnasari**





Direktur Perumdam Tirta Kandilo, Suryanto Agustono

## KETERSEDIAAN AIR BERSIH AMAN MESKI MASIH MUSIM KEMARAU

**PASER** - Penyaluran air bersih bagi pelanggan di Kabupaten Paser, dipastikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kandilo berlangsung normal meski kemarau panjang belum berakhir.

Direktur Perumdam Tirta Kandilo, Suryanto Agustono memastikan, walau ketersediaan air masih terbilang minim, namun distribusi air bersih ke seluruh pelanggan sudah berjalan. Sementara kendala air baku tengah dibenahi.

Kami siapkan alat pompa portable dipinggir sungai. Karena kemarin permukaan air tidak mampu mencapai WTP. Jadi kita buatkan solusinya seperti itu," kata Suryanto, Kamis (14/9/2023).

Sementara terhadap ketersediaan air untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Kecamatan Tanah Grogot, juga ia pastikan tidak mengalami kendala.

"Untuk BPBD, Dinsos sudah kita

layani dan penuhi kepada masyarakat yang membutuhkan, baik di kecamatan dan semua berjalan lancar," urai Suryanto.

Ia mengaku sempat ada pembatasan penyediaan air ke masyarakat umum di Kecamatan Long Kali. Sebab Perumdam Tirta Kandilo lebih mengutamakan masyarakat yang sudah menjadi pelanggan.

"Ada jam-jam tertentu yang tidak kita izinkan untuk mengambil air di Long Kali, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan," kata Suryanto.

Distribusi air bersih di Kecamatan Tanah Grogot juga sempat mengalami kendala, bahkan air yang diterima konsumen keruh, dan sering macet di masa transisi ke musim kemarau. Dijelaskannya kini sudah tangani dan tindaklanjuti.

"Alhamdulillah sudah berjalan lancar distribusi air ke rumah warga Tanah Grogot," ungkapnya.

**Pewarta : Bhakti Sihombing**

**Editor : Nicha Ratnasari**

KORAN **DIGITAL**

**radar.**  
MEDIA

**RADAR SAMARINDA**

**EDISI JUMAT**  
15 SEP 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

**.COM**



# PEMBEBASAN LAHAN BENDUNGAN MARANG KAYU, BANYAK WARGA BELUM TERIMA KOMPENSASI

**MUDA  
BERAHLAK  
AMANAH  
DINAMIS**

**ARIE  
WIBOWO**

**CALEG DPRD KOTA SAMARINDA**  
DAPIL 5 SAMARINDA UTARA - SUNGAI PINANG



# PEMBEBASAN LAHAN BENDUNGAN MARANG KAYU, BANYAK WARGA BELUM TERIMA KOMPENSASI

**SAMARINDA** - Persoalan pembebasan lahan Bendungan Marang Kayu masih menjadi polemik yang belum terselesaikan hingga saat ini. Hal demikian ditanggapi sejumlah legislator baik DPRD Kaltim dan DPR RI.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, meminta warga yang merasa belum mendapatkan haknya untuk bersurat ke DPRD Kaltim untuk dapat ditindaklanjuti dengan rapat dengan sejumlah stakeholder terkait.

Politisi PAN ini mengungkapkan, sejak dirinya masih menjabat sebagai Kepala Desa 2006 lalu, hanya segelintir masyarakat yang mendapatkan haknya. Selebihnya masih banyak warga yang belum diberikan kompensasi pembebasan lahan.

"Harus segera diselesaikan, yang kasihannya lagi banyak pemilik lahan itu yang sudah meninggal, sekarang yang melanjutkan perjuangan itu anak-anak mereka," jelasnya kepada awak media, Kamis (14/9/2023).

"Kalau ada surat masuk setidaknya kami bisa tindaklanjuti itu dengan pertemuan, kemudian mengundang lembaga-lembaga terkait termasuk Pemprov Kaltim dan LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara)," sambungnya.

LMAN sendiri sebutnya, kini menjadi penanggungjawab pembebasan lahan warga untuk pembangunan Bendungan Marang Kayu. Sebelumnya soal pembebasan lahan ini merupakan kewajiban dari Pemprov Kaltim.

"LMAN ini bisa mengurai apa yang menjadi kendala pembebasan lahan ini masih belum tuntas, dari uraian masalah itu mereka seharusnya bisa berikan solusinya," tandasnya.

Anggota Komisi V DPR RI Irawan, telah meninjau progres pembangunan Bendungan Ma-



Bendungan Marang Kayu, Kutai Kartanegara

rangkayu beberapa waktu lalu. Bendungan ini sebutnya, telah mangkrak sejak 2007 karena terkendala pada persoalan sosial.

Padahal menurutnya, selain dapat mengatasi persoalan irigasi untuk pertanian di Marangkayu, Bendungan ini dapat menyuplai kebutuhan air bersih hingga Kota Bontang. Untuk itu ia mendorong pemerintah dapat segera mengentaskan persoalan sosial, yang masih menyandera hak-hak dari masyarakat setempat.

Mngingat Bendungan Marangkayu adalah proyek strategis nasional, ia mendorong pemerintah pusat segera mengentaskan persoalan-persoalan yang terjadi saat ini.

"Ini PR pemerintah Jokowi, kalau ini tidak tuntas pemerintah Jokowi gagal," ujarnya.

Sementara Kepala Desa Sebuntal, Herman, menjelaskan kurang lebih 16 tahun sudah pembebasan lahan Bendungan Marangkayu belum klir. Sehingga ia mendorong penyelesaian lahan yang belum dibebaskan agar tidak menimbulkan gejolak lebih besar di tengah warga Sebuntal.

"Apa- apa yang menghambat permasalahan lahan agar segera

diselesaikan karena ini (bendungan) sangat dinantikan untuk irigasi masyarakat," ucapnya.

Ia pun berharap ada pendampingan dari pemerintah terkait pembebasan lahan, mengingat warga banyak yang tidak memahami soal hukum. "Kami harap ada bantuan dari Kementerian PUPR atau pusat untuk warga kalau memang proses ke pengadilan," tukasnya.

Sebagai informasi bendungan dengan luas 678,59 hektare ini memiliki dua tahap penggenangan yakni 107 meter dan 110 meter. Sejak tahun 2020 silam sudah ada empat kali pembayaran yakni pada 15 Oktober 2020 sebanyak 35 bidang, 9 Februari 2021 sebanyak 5 bidang, dan 14 Februari sebanyak 54 bidang. Adapun ujanya, masih ada 100 hektare lagi yang belum terbayarkan untuk area penggenangan tahap pertama.

Salah satu faktor lambannya proses pembayaran adalah tumpang tindih lahan antara warga dan perusahaan. Ada sembilan titik sumur minyak dari SKK Migas dan satu tower SUTT yang masuk dalam area bendungan.

**Pewarta : Andi Desky**  
**Editor : Nicha Ratnaari**